

**KERJA SAMA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN INDONESIA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

BRIGITHA LEOVANI PAILO

E 061 21 1 106

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2026



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJA SAMA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN INDONESIA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

N A M A : BRIGITHA LEOVANI PAILO

N I M : E061211106

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Mengetahui :
Pembimbing,

Makassar, 13 Januari 2026

Mengesahkan
Ketua Departemen Ilmu Hubungan
Internasional,


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP 198909132024061001


Prof. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP 1976020222000122003



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

with CamScanner

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJA SAMA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN INDONESIA
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

N A M A : BRIGITHA LEOVANI PAILO

N I M : E061211106

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jumat, 12 Desember 2025.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec

Anggota : 1. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

2. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR



HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

with CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brigitha Leovani Pailo
NIM : E061211106
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

***“Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia
dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”***

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 13 Januari 2026



Brigitha Leovani Pailo



with CamScanner

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya yang senantiasa nyata dalam setiap proses kehidupan penulis, khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Berkat tuntunan dan kekuatan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”** serta dapat menyelesaikan studi pada program sarjana. Skripsi ini merupakan karya dan persembahan terakhir penulis yang disusun dengan penuh dedikasi disertai dengan bimbingan dari banyak pihak yang Penulis sangat apresiasi dalam menyelesaikan pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin serta sebagai bentuk kontribusi penulis dalam pengembangan isu-isu ekonomi dan pemberdayaan perempuan yang menjadi fokus minat dan perhatian penulis. Semoga skripsi ini dapat dijadikan pemantik semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus melanjutkan studi dan mendalami dinamika Hubungan Internasional di masa yang akan datang.

Selama menjalani kurang lebih 4 tahun masa perkuliahan, berbagai pengalaman, pembelajaran, momen yang berharga dan berkesan, serta proses refleksi telah membentuk kedewasaan intelektual dan personal penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini bukan semata hasil usaha pribadi, melainkan buah dari dukungan, doa, dan kontribusi banyak pihak yang dengan tulus menyertai perjalanan akademik penulis. Kepada orang-orang yang pernah hadir, menemani, memberi arti dan mewarnai hari-hari penulis selama menghabiskan masa studi ini, baik dalam suka maupun duka, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dalam penyelesaian skripsi ini.

1. **Kedua orangtua terkasih penulis, Bapak Rudi, S.Sos & Mama Ns. Martina Malla, S.Kep., M.M** yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan, dan telah memberikan penulis berbagai *privilege* terbaik dalam bentuk kepercayaan yang tidak pernah putus serta dukungan yang penuh atas segala kegiatan yang penulis jalani. Kesabaran, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan menjadi fondasi utama yang menguatkan penulis dalam setiap langkah, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Thank you Ma, Pak, for loving me not just for who I am, but for who I am becoming. You both are my greatest blessings in my life, may God bless both of you, always!

Kedua adik penulis: Videlia Derby Pailo dan Maria Revalina Asikkaraeng, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih dalam berbagai bentuk. Kehadiran kalian menjadi



penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan percaya bahwa setiap proses yang dijalani memiliki makna. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu menerima, menguatkan, dan mengingatkan penulis untuk tetap rendah hati serta bersyukur dalam setiap capaian.

Thank you for being my constant support system, and for reminding me that no matter how far I go, I always have a family to come home to. Family first! Always.

3. **Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan inovasi-inovasi terbaik dalam mengembangkan kampus.
4. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Phil Sukri, M. Si, Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kualitas terbaik dalam proses pembelajaran di fakultas.
5. **Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, Prof. Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D** yang telah menjadi figur pemimpin inspiratif bagi penulis. Bimbingan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis berkembang dan mencapai berbagai pencapaian akademik.
6. **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D**, yang telah menjadi sosok inspiratif bagi penulis. Terdapat begitu banyak pembelajaran serta pencapaian yang dapat penulis raih berkat dukungan, kepercayaan, serta fasilitas yang begitu optimal diberikan oleh Prof. Darwis.
7. **Kak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, M.IR**, selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada penulis dalam setiap langkah akademik yang penulis ambil selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Penulis juga bersyukur mendapatkam figur dosen pembimbing yang penuh semangat membimbing, mendukung dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
Your mentorship has shaped not only this thesis, but hopefully my way of thinking as well.
8. **Seluruh jajaran pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Unhas** yang selalu menjadi sumber motivasi bagi penulis atas dedikasi dan perannya dalam menumbuhkan semangat belajar serta pengembangan keilmuan penulis, baik itu di dalam maupun di luar ruang kelas: **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D., Bapak Drs. Patrice umumba, MA., Bapak (Alm.) Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Bapak rs. H. Husein Abdullah, M. Si., Bapak M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., apak Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP,**



Ibu Prof. Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Ibu Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Ibu Nur Isdah, S. IP., MA, Bapak Burhanuddin, S. IP., M. Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Bapak Dr. Adi Suraydi B. MA., Kak Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Kak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc., L.LM., Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA, Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA., Kak Aswin Baharuddin, S.IP, MA., Kak Muh. Ashry Sallatu S.IP., M.Si., Kak Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Kak Muhammad Rizal S.IP., MA., Kak Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA., Kak Imam Fadhil Nugraha, S.IP., MA., dan Kak Wira Atman, S.IP., MA. Terima kasih atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Juga, kepada seluruh Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahmah, Pak Ridho,** dan **Kak Salni** yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan dan kebutuhan-kebutuhan administrasi sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

9. **Kak Annisa Apriliani**, figur kakak perempuan, senior, dan mentor yang menginspirasi dan berperan besar dalam perjalanan akademik dan *personal growth* penulis. Dengan kerendahan hati dan sikap yang terbuka, Kak Icha selalu senang diajak untuk berdiskusi kapanpun itu. Terima kasih atas kebijaksanaan, ketulusan, kebaikan, ilmu dan berbagai motivasi yang senantiasa dibagikan. Bahkan di saat penulis meragukan kemampuan diri sendiri, Kak Icha selalu punya cara untuk meyakinkan dan mendorong penulis *to aim higher* dan percaya pada potensi yang dimiliki.

I couldn't be happier or prouder to have had the privilege of learning so much from you, kak! Thank you for your boundless support and guidance. May you always be blessed with love!

10. **BlackPink Comeback**, ketiga wanita luar biasa, para sahabat yang juga penulis anggap seperti saudari, **Riqqah Puspa Dewi, Naurah Syifa Apsara dan Liza Faizah Rizqiah** yang telah menjadi ruang bertumbuh, tempat berbagi cerita, serta sumber semangat di tengah dinamika dan tekanan proses akademik. Kebersamaan, perhatian, dan dorongan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki arti yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih atas kesetiaan serta *unconditional support* yang tidak hanya hadir dalam tawa, tetapi juga dalam proses-proses paling melelahkan, penuh keraguan, dan sunyi. Lebih dari itu, kalian telah menginspirasi penulis untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. *We stood by each other, comfort one another, and cheered the loudest for each other ru thick and thin. Thank you for walking this journey with me. May the ree of you continue becoming as an independent, thoughtful women, and aking meaningful impact through your work.*



11. **Board of Ex-ecutive, A. Mario Farrasda AS, Riswandi Ramadhani, dan Riqqah Puspa Dewi**, teman seperjuangan yang hadir dengan dedikasi, pemikiran, dan keberanian untuk mengambil setiap peluang serta bertumbuh bersama. Siapa sangka, bisa kenal jauh lebih dekat dengan kalian bertiga, dan akhirnya bertemu dengan sosok yang sangat kompeten, *reliable, thoughtful*, dan seru parah. Terima kasih atas kepercayaan yang dipupuk, percakapan-percakapan bermakna yang membuka perspektif, serta dukungan yang saling menguatkan di tengah proses dan tantangan yang dijalani. *I wouldn't want to do this with anyone else, my forever Pak Pres, Treasurer, and Bu Secre. May we continue to grow with purpose, courage, and mutual trust wherever our paths may lead.*
12. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengenang dan mendoakan seorang teman baik dan *strategic ally* di setiap kegiatan, **(Alm.) Muhammad Rezky Hafidzzur Rahim**. Terima kasih Rez, atas segala kebaikan, kebersamaan, dan kenangan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Kehadiranmu, meskipun tidak lagi secara fisik, tetap meninggalkan pelajaran tentang arti ketulusan dan kepedulian. Doa dan rasa syukur penulis panjatkan atas pertemuan yang pernah ada; semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan beristirahat dalam damai. *Big smile for our big hearted man (just like you always did!). Watch us from heaven! Fly high, Rez!*
13. Teman-teman terdekat penulis, **Nur Afifah Ramadhani, Nur Muthmainah (Cici), dan Adhitya Anwar**, yang dengan cara dan kepekaan masing-masing senantiasa berupaya hadir, baik dengan memberikan dukungan, perhatian, serta kebersamaan dalam berbagai fase perjalanan akademik penulis. Kehadiran kalian menjadi ruang berbagi yang jujur, tempat penulis belajar untuk merasa cukup, didengar, dan dimengerti tanpa harus selalu menjelaskan segalanya. Di antara banyak dinamika yang dilewati, kebersamaan dengan kalian menghadirkan perspektif baru, menenangkan pikiran, dan menguatkan penulis untuk terus melangkah. *May the road ahead treat each of you gently, with growth that feels earned, clarity that feels grounding, and a life that stays true to who you are becoming.*
14. Teman baik yang penulis anggap sebagai dosen pembimbing kedua, **Hafidz Zaula Miftah**, pribadi yang dengan kesabaran, kepekaan, dan cara berpikirnya sangat sering membantu penulis melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih utuh. Apalah saya ini, tanpa jasa revisi, *review*, dan intuan kepenulisanmu bro. Terima kasih atas kesediaan untuk selalu berdiskusi, meluangkan waktu, serta memberi masukan yang jujur dan membangun.



May every good things you have shared with others find its way back to you in the form of blessings, ease, and meaningful accomplishments, brow!

15. Dinda **Ugi Fitri Syawalyani dan Kanda Agun Sesar**, teman dekat yang luar biasa penulis kagumi atas keaktifan, visi, dan semangat untuk terus belajar serta berkontribusi kembali. Kalian merepresentasikan harapan dan masa depan kepemimpinan Indonesia Timur yang progresif dan membumi. Terima kasih atas inspirasi, diskusi, dan energi positif yang selalu menular, serta keyakinan bahwa perubahan nyata lahir dari anak muda yang mau terlibat dan bergerak. *Ewako Sulse!*
16. **Agnes Ria Febriyanti**, *bestie* yang penulis temui sewaktu magang di Bagian Protokol DPD RI, Jakarta, dan kini sudah penulis anggap saudara yang terus saling berkabar, mendoakan, dan menguatkan satu sama lain dari kejauhan. Terima kasih Nes, atas semua kebaikan, bantuan, perhatian, dan kehadiran yang konsisten, yang membuat jarak tidak pernah benar-benar menjadi penghalang. Sehat dan sukses selalu ya Nes, Tuhan Yesus memberkati!
17. Kakak-kakak senior, **Kak Nandito Oktaviano Guntur dan Kak Muhammad Rizal** yang dengan rendah hati, selalu terbuka untuk diajak berdiskusi kapanpun dibutuhkan, khususnya selama penulis menjalani masa magang di Jakarta. Kehadiran dan dorongan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan pembelajaran berharga dalam fase tersebut.
18. Kakak-kakak senior, **Kak Ellen, Kak Raihan, Kak Karisma, Kak Regina, Kak Lilis, Kak Fajhriyadi, Kak Sonia, Kak Reul, Kak Geiby, Kak Nanda, Kak Cacaz, Kak Ratu, Kak Rusa, Kak Vanissa, Kak Kezia, Kak Natasya, dan Kak Fauzan** terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta kehadiran yang tulus dalam setiap fase perjalanan perkuliahan penulis. Nasihat, teladan, dan semangat yang kalian bagikan, telah menjadi bagian penting dalam proses bertumbuh penulis dengan makna dan berkesan.
19. *Circle* pertemanan penulis sejak SD, **Veronica Widya Ayuningsih, Maylisa Paembonan, Caecilia Febrianne Pagasing, Rico Adrian Naibaho dan Prawira Tribudi Utama SB**, serta lainnya yang tetap hadir hingga hari ini. Terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang terus mengalir, meskipun waktu dan jarak membawa kita ke arah yang berbeda. Konsistensi kalian dalam mengupayakan dukungan dan menguatkan dari kejauhan menjadi pengingat bahwa persahabatan yang tulus tidak lekang oleh waktu dan fase kehidupan.



'ay the years ahead keep us grounded, connected, and grateful for where all began. Jesus bless you, guys!

14SMA, Naura Fatimah, Muh. Iqra Nurdin, Alfian, Zulkifli dan Tegar ermawan Tahir, lingkaran pertemanan penulis sejak masa SMA yang

tumbuh bersama waktu dan perubahan. Terima kasih atas kebersamaan yang tetap terjaga, percakapan yang selalu hangat, serta dukungan yang hadir tanpa banyak tuntutan. Kebersamaan dengan kalian menjadi pengingat akan fase-fase awal yang membentuk cara penulis melihat dunia dan diri sendiri. Semoga kita selalu *protect each other and success together!*

21. Seluruh teman-teman **REVIVAL 21** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terkhusus **Ibnu, Kak Arya, Firdha, Cherryl, Fahri, Nina, Reza, Aneesha, Mucha, Vanya, Asyam, Satria, Caca, Aan, Arika, Chessy, Aza, Ipal, Bila, Pute, Suci, Alya, Zheylya, dan Agrid.** *I feel incredibly grateful to have crossed paths with this group of friends*, tempat belajar banyak hal, bertemu individu-individu hebat, bertumbuh bersama, dan saling membantu di berbagai situasi.
22. Tim MustPool Jaya, dalam hal ini **Arliana Syafitri, Tita Andraena, Afdhal Faizur Ridho, Abdi Ardiansyah, Amos Shifrieth Makalew, Farell Bryan Ursipuny, Muhammad Farhan, Cakra Tri Sastrawiguna, El Shadday Putra Sarira, Caltha Tikupaseng, Juan Wala, dan Rachel Rapar** yang pada suatu momen dalam perjalanan kampus penulis tepat hadir merangkul dan menemani. Terima kasih sudah menjadi adik, kolega dan teman yang begitu baik, tiap kali penulis butuh, atau sekedar ingin bertemu semuanya itu selalu diupayakan dan didukung sepenuhnya. Sukses selalu untuk semua rencana dan usaha kalian, God bless.
23. Adik-adik, **Marissa Safira, Patricia Clarence, Naila Aulia, Indhie Rina, Aflahal Mukmin, Zadrach Windessy, Avril Faith, Arifah Nursyahbani, Riva Ramadhani, Callysta Emily, Andi Syakirah, Ashrie Wahid, Efraim Owen, Rofif Hudson, M. Fran, Athillah Irham Fairuzzaki, Zamrud Ichsan Rafi, dan Dzaky Wiyanda**, yang kehadirannya mengingatkan penulis bahwa semangat untuk terus belajar, bertanya, dan bertumbuh selalu hidup. Terima kasih atas energi, rasa ingin tahu, dan kejujuran dalam berproses, yang secara tidak langsung turut memberi semangat dan perspektif baru bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
24. Teman-teman **IR Stuvo Batch 3 dan 4 #TerlaHirKeren, Empowered Community FISIP Unhas, Hasanuddin English Debating Society 2022-2014, Unhas MUN Community 2023-2025, Makassar MUN 2024, Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Unhas 2023-2025, Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter South Sulawesi 2023-2025, GenBI Universitas Hasanuddin & Sulawesi Selatan 2024-2025, Team EDx Hasanuddin University Vol.2 dan Young Leaders for Indonesia /ave 16 by McKinsey and Co. Indonesia**, yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, eksplorasi, dan pertumbuhan penulis selama masa perkuliahan. Berada di tengah lingkungan yang dinamis dan



progresif ini memperkaya perspektif penulis serta menumbuhkan semangat untuk terus berkembang. *I am deeply inspired by your collective passion, discipline, and relentless drive to grow.*

25. Pimpinan, para staf, mentor, serta rekan-rekan magang di **Alliance Française de Makassar, Bakrie Center Foundation (Program MSIB), dan Bidang Protokol Sekretariat Jenderal DPD RI**, yang telah memberikan ruang belajar, pengalaman profesional yang berharga, serta bimbingan yang memperkaya kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas kepercayaan, arahan, dan kesempatan yang diberikan untuk bertumbuh tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara personal dan profesional.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian hubungan internasional dan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar, 13 Januari 2026

Penulis,

Brigitha Leovani Pailo



ABSTRAK

Brigitha Leovani Pailo, (E061211106), “Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” dibawah bimbingan Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR sebagai pembimbing pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pemberdayaan ekonomi perempuan penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Meski Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif nasional, tantangan seperti keterbatasan pendanaan, kesenjangan implementasi kebijakan, dan minimnya dukungan sektor swasta untuk budaya kerja responsif gender masih menjadi hambatan. Penelitian ini menganalisis kerja sama bilateral Australia-Indonesia melalui inisiatif Investing in Women (IW) periode 2016-2025 sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama bilateral dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dasar kerja sama dan menganalisis wujud implementasi kerja sama kedua negara dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan *stakeholder* kunci yaitu, DFAT Australia dan IBCWE, serta kajian pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama didasari oleh penyatuan kepentingan strategis yang terintegrasi dalam Australia's International Gender Equality Strategy, Comprehensive Strategic Partnership (CSP), dan Development Partnership Plan (DPP) 2024-2028, dengan landasan normatif CEDAW, Beijing Platform for Action, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Implementasi kerja sama terwujud melalui pembentukan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) serta kontribusi nyata terhadap SDG 5 melalui peningkatan kepemimpinan perempuan dan SDG 8 melalui promosi praktik kerja inklusif gender. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya kerja sama bilateral berbasis *multi-stakeholder* dalam mendorong transformasi struktural pemberdayaan ekonomi perempuan, sekaligus merekomendasikan perlunya perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum untuk menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Kata Kunci: Kerja Sama Bilateral, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Investing in Women, Hubungan Australia-Indonesia, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).



ABSTRACT

Brigitha Leovani Pailo, (E061211106), “The Cooperation between the Australian Government and Indonesia in Women's Economic Empowerment” under the guidance of Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR as advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

Women's economic empowerment is important for achieving gender equality and inclusive economic growth. Although Indonesia has implemented various national initiatives, challenges such as limited funding, policy implementation gaps, and minimal private sector support for gender-responsive work cultures remain obstacles. This study analyzes Australia-Indonesia bilateral cooperation through the Investing in Women (IW) initiative for the 2016-2025 period as a response to these gaps. This research uses the concepts of bilateral cooperation and women's economic empowerment. The objective of this study is to identify the basis for cooperation and analyze the implementation of cooperation between the two countries in women's economic empowerment. This research adopts a descriptive-analytical qualitative method. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, namely DFAT Australia and IBCWE, as well as library research.

The results show that cooperation is based on the integration of strategic interests in Australia's International Gender Equality Strategy, Comprehensive Strategic Partnership (CSP), and Development Partnership Plan (DPP) 2024-2028, with the normative foundations of CEDAW, the Beijing Platform for Action, and the Sustainable Development Goals (SDGs). The implementation of cooperation is realized through the establishment of the Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) and tangible contributions to SDG 5 through the enhancement of women's leadership and SDG 8 through the promotion of gender-inclusive work practices. This study implies the importance of multi-stakeholder bilateral cooperation in promoting structural transformation of women's economic empowerment, while recommending the need for a legally binding bilateral agreement to ensure the sustainability of long-term programs.

Keywords: Bilateral Cooperation, Women's Economic Empowerment, Investing in Women, Australia-Indonesia Relations, Sustainable Development Goals (SDGs).



DAFTAR ISI

AN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	9
1.2.1 Batasan Masalah	9
1.2.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Konseptual	12
1.4.1 Kerja sama Bilateral	12
1.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	14
1.5 Operasionalisasi Variabel	19
1.6 Model Analisis	20
1.7 Metodologi Penelitian	20
1.7.1 Jenis Penelitian	20
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7.3 Teknik Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Kerja Sama Bilateral	25
2.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	32
2.2.1 Penelitian Terdahulu	38
2.2.2 Gambaran Umum	48



3.1 Kerja Sama Bilateral Australia-Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan	48
3.1.1 Sejarah Hubungan Bilateral Australia-Indonesia	48
3.1.2 Prioritas Kerja Sama Bilateral Australia-Indonesia	50
3.1.3 Posisi Isu Pemberdayaan Perempuan dalam Agenda Kerja Sama	51
3.2 Inisiatif Investing in Women	55
3.2.1 Profil Inisiatif Investing in Women	55
3.2.2 Pilar Utama Program	57
BAB IV KERJA SAMA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN	60
4.1 Dasar Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	60
4.2 Wujud Implementasi Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	73
4.2.1 Pembentukan IBCWE	74
4.2.2 Kontribusi terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Analisis terhadap SDG 5 dan SDG 8	84
4.2.2.1 Kontribusi terhadap SDG 5: Kesetaraan Gender	84
4.2.2.2 Kontribusi terhadap SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	87
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
Lampiran 1. Kerangka Acuan Penelitian	
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dan Daftar Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian	
Lampiran 4. Lembar Pernyataan Persetujuan	
Lampiran 5. Transkrip Rekaman Wawancara dengan Perwakilan Pemerintah Australia	
Lampiran 6. Transkrip Rekaman Wawancara dengan IBCWE	
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara	



DAFTAR TABEL

Operasionalisasi Variabel Penelitian	19
--	----

Tabel 2 Sumber Data Penelitian	22
Tabel 3 Tabulasi Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4 Dasar Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	70
Tabel 5 Kontribusi terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Analisis terhadap SDG 5 dan SDG 8	95



DAFTAR GAMBAR

1 Elemen-elemen Kunci Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	36
--	-----------

Gambar 2. Pelaksanaan HR Management Training.....	79
Gambar 3. Pelaksanaan Program Advokasi ‘Lelaki Turut Serta’	81

DAFTAR BAGAN

1 Model Analisis.....	20
------------------------------	-----------



DAFTAR SINGKATAN

: Australian Development Investments

: Australian Dollar (Dolar Australia)



BPS	: Badan Pusat Statistik
CSO	: Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)
CSR	: Corporate Social Responsibility
CSP	: Comprehensive Strategic Partnership
DAWN	: Development Alternatives with Women for a New Era
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade (Australia)
DPP	: Development Partnership Plan
EDGE	: Economic Dividends for Gender Equality
ESG	: Environmental, Social, and Governance
GEARS	: Gender Equality Assessment, Results, and Strategies
HR	: Human Resources
IBCWE	: Indonesia Business Coalition for Women Empowerment
ILO	: International Labour Organization
IW	: Investing in Women
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
MAMPU	: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
MDGs	: Millennium Development Goals
MoU	: Memorandum of Understanding
NCP	: New Colombo Plan



: Official Development Assistance (Bantuan Pembangunan Resmi)

: Organisation for Economic Co-operation and Development

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
SDG/SDGs	: Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SMART	: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound
SNKI Perempuan	: Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan
STEM	: Science, Technology, Engineering, and Mathematics
UMi	: Ultra Mikro (Program Pembiayaan)
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN	: United Nations
UNDP	: United Nations Development Programme
UN Women	: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
WEE	: Women's Economic Empowerment
WEPs	: Women's Empowerment Principles
WID	: Women in Development



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan kerangka dasar penelitian mengenai kerja sama Australia-Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Pembahasan dimulai dengan latar belakang yang mengidentifikasi urgensi pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, tantangan struktural yang dihadapi, serta relevansi kerja sama internasional sebagai strategi penguatan upaya domestik. Selanjutnya, bab ini merumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus analisis, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menyajikan tinjauan pustaka yang membangun landasan konseptual dan teoretis. Kerangka pemikiran dan metodologi penelitian juga diuraikan untuk memberikan arahan sistematis dalam proses analisis. Melalui bab ini, penelitian berupaya membangun fondasi komprehensif untuk memahami dinamika kerja sama bilateral dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inisiatif Investing in Women (IW).

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan ekonomi perempuan telah menjadi agenda pembangunan global yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir dan diakui sebagai komponen penting dalam mencapai kesetaraan gender serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai sarana di mana perempuan memperoleh kompetensi, memiliki kemampuan untuk memecahkan dan mendapatkan dukungan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih sejumlah studi kemudian menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi



perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan ialah mekanisme untuk mengurangi kemiskinan yang membantu pencapaian kemajuan ekonomi perempuan, serta akses ke peluang, layanan, dan sumber daya, yang mencakup kemampuan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan pasar, beban kerja yang dapat dikelola (baik yang dibayar maupun tidak dibayar), serta mempromosikan kesejahteraan perempuan melalui kebijakan yang setara, hukum, praktik institusional, dan norma sosial (Boadi et al., 2025). Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal, tetapi juga mencakup dimensi struktural yang lebih dalam, yakni penguasaan atas sumber daya ekonomi, kemampuan mengambil keputusan dalam lingkup ekonomi, serta pergeseran relasi kuasa dalam struktur sosial yang sering kali bersifat patriarkal.

Indonesia, negara dengan populasi penduduk mencapai 281,6 juta jiwa dan sekitar 49,8% dari total penduduk adalah perempuan (Badan Pusat Statistik, 2024), pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki potensi transformatif yang tidak hanya untuk peningkatan kehidupan perempuan dan keluarga mereka tetapi juga untuk penggerak ekonomi nasional secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia selama dekade terakhir (2015-2025) menunjukkan dinamika yang kompleks dengan kemajuan signifikan di beberapa aspek namun juga tantangan yang persisten di aspek lainnya. Mengutip informasi laman GoodStats yang mengambil data dari International Labour Organization (ILO),

in 2015, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia tidak
ni perubahan yang besar, angkanya tercatat sebesar 53,2%, yang sedikit



meningkat di tahun berikutnya menjadi 53,4%. Puncak tertinggi tercatat pada 2019, dengan tingkat partisipasi mencapai 56,3%. Namun, setelah itu, angka tersebut mengalami penurunan dan cenderung stabil di kisaran 54,7%. Persentase sebesar 54,8% bahkan diproyeksikan terjadi di tahun 2025 dan angka tersebut masih tergolong rendah (Yonatan, 2025).

Meski demikian, pertumbuhan kewirausahaan perempuan merupakan salah satu tren positif yang dominan. Data pada tahun 2021 menyebut sebanyak 60% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perempuan. Angka ini memperlihatkan keterlibatan aktif perempuan dalam sektor ekonomi produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional (D.I., 2023). UMKM sendiri berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini pun berkenaan dengan transformasi digital yang menghadirkan potensi strategis bagi perempuan untuk memperluas cakupan pasar usaha mereka melalui *e-commerce*, dengan mengoptimalkan efisiensi dalam operasional bisnis, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan berbasis teknologi (keuangan digital), dikarenakan banyak yang memulai bisnis digital selama pandemi COVID-19.

Pada tanggal 9 Juni 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan). Strategi ini muncul sebagai respons atas dampak pandemi COVID-19 dan bertujuan meningkatkan inklusi keuangan yang turut menarget sektor swasta dan investasi ekonomi perempuan di



skala regional dengan model kolaborasi *multi-stakeholders* melalui peningkatan literasi keuangan, akses ke layanan keuangan formal, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan sehingga tercipta kemandirian ekonomi perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2020). Dua tahun kemudian, Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) dibentuk melalui kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan sektor swasta bersama mitra strategis yakni Women's World Banking (Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Selain itu, di tahun 2021, pemerintah melalui program pembiayaan pengembangan usaha yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) turut memberikan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada pelaku usaha kecil, dengan fokus pada perempuan. Sampai saat ini, program ini telah mencapai sekitar 9,4 juta debitur, dimana 96% di antaranya adalah perempuan. Ini menandakan bahwa perempuan merupakan penerima utama dari manfaat program ini, yang bertujuan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka (D.I., 2023) serta masih banyak lagi.

Meskipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan, upaya nasional terus menghadapi keterbatasan dalam mengatasi tantangan struktural pemberdayaan ekonomi perempuan. Tak dapat dipungkiri bahwa kendala pendanaan akibat keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis membatasi jangkauan serta dampak dari

nasional, kemudian adanya ketidakmerataan atau kesenjangan
nasi kebijakan antar wilayah di Indonesia. Berbagai inisiatif juga kerap



beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai antar kementerian dan lembaga.

Apabila diperhatikan dengan seksama sebagian besar program pemerintah berfokus pada UMKM perempuan, khususnya mikro, dan sektor informal. Kebijakan atau insentif bagi perusahaan besar atau *private sector* untuk membangun budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender masih lemah dan belum menjadi arus utama dalam reformasi tenaga kerja. Sektor swasta berperan penting dalam membuka akses bagi perempuan terhadap jaringan bisnis, teknologi, logistik, pendanaan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Tanpa peran aktif sektor ini, perempuan rentan terjebak dalam ekonomi informal tanpa jaminan sosial, keamanan kerja, atau peluang mobilitas ekonomi.

Disamping itu, disparitas gender masih terlihat jelas, terutama di tempat kerja. Segregasi okupasional dan sektoral masih menonjol, dengan perempuan terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu. Perempuan membentuk mayoritas tenaga kerja di sektor jasa, tekstil, dan pertanian subsisten, sementara tetap kurang terwakili di sektor pertambangan, konstruksi, dan transportasi. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam menjawab tantangan zaman seperti akses terhadap investasi berperspektif gender, upaya mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, serta peningkatan advokasi dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mendukung kesetaraan gender.

Olehnya itu, perlu adanya intervensi yang lebih luas, terintegrasi, dan

if. Dalam konteks ini, dibutuhkan ekspansi kerja sama. Kerja sama
ional merujuk pada suatu upaya antar negara yang bertujuan untuk



mengatasi permasalahan global dan mencapai tujuan bersama. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), menjadi subjek penting dalam berbagai skema kemitraan pembangunan internasional. Kedua agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tersebut menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan di seluruh lini pembangunan, termasuk di lingkungan korporasi dan lembaga keuangan.

Saat ini semakin banyak investor global yang menetapkan standar keberlanjutan melalui kebijakan Environmental, Social, and Governance (ESG), yang di dalamnya mencakup komitmen terhadap kesetaraan gender. Oleh karena itu, peningkatan inklusi gender di sektor swasta tidak hanya akan memperluas kesempatan bagi perempuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi Indonesia, seperti meningkatnya minat investasi asing dan perbaikan citra daya saing global melalui indikator seperti Global Gender Gap Index. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan, kerja sama internasional dapat dilihat sebagai cara berbagi praktik terbaik yang dapat membawa perspektif baru, keahlian teknis, dan sumber daya tambahan.

Sebagai contoh, program WeEmpowerAsia yang didanai dan dijalankan bersama oleh UN Women bersama Uni Eropa (2019-2022) yang bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam bisnis sektor swasta

negara Asia: Tiongkok, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Program ini berfokus pada promosi praktik bisnis yang responsif gender



untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat rantai pasok dan perdagangan yang sensitif gender antara pasar Asia dan Eropa (UN Women, 2019). Program ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun praktik bisnis responsif gender di Indonesia. Akan tetapi, pada 2020 program utamanya telah berakhir dikarenakan karakteristik program donor internasional dan kemitraan pembangunan yang hanya dirancang dalam siklus pendanaan awal (UN Women, 2019).

Di antara berbagai kemitraan internasional yang telah terjalin, terdapat pula kerja sama dengan Australia. Australia telah dikenal sebagai negara yang aktif dan sangat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen Australia terhadap kesetaraan gender tercermin dalam kebijakan luar negerinya, dimana pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas utama dalam program bantuan luar negeri Australia. Bersumber pada informasi "*Gender Equality and Women's Empowerment Strategy*" yang dikeluarkan oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, negara tersebut memprioritaskan investasi pada program-program yang mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik (Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, 2016).

Pada tahun 2016, inisiatif Investing in Women (IW) yang digagas oleh Pemerintah Australia merupakan salah satu contoh kolaborasi lintas negara yang



da pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, Myanmar, Filipina
am (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2024). Di Indonesia, inisiatif

ini telah berhasil membentuk Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), yang kini memiliki 35 perusahaan anggota yang mewakili 435.000 karyawan, dan investasi pada bisnis yang dipimpin perempuan yang telah menghasilkan investasi tambahan sebesar AUD 255 juta (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2024). Dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi perempuan, IW berupaya untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi masyarakat dan membangun ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, serta berkeadilan gender (Investing In Women, 2016).

Inisiatif Investing in Women melibatkan dua *stakeholder* utama yang berperan penting dalam implementasi dan keberhasilannya di Indonesia. Pertama, Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang berperan sebagai inisiator, pendana utama, dan penyusun kerangka strategis program. DFAT tidak hanya menyediakan pendanaan senilai lebih dari AUD 102 juta untuk keseluruhan program di empat negara, tetapi juga menyumbangkan keahlian teknis, dukungan diplomatik, dan jaringan internasional yang memungkinkan inisiatif ini berjalan secara efektif (DFAT, 2019). DFAT juga melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan evaluasi strategis untuk memastikan program tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan prioritas kerja sama bilateral Australia-Indonesia. *Stakeholder* kedua adalah Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), yang berperan sebagai mitra implementasi lokal dan ujung tombak perubahan di tingkat sektor donesia.



Signifikansi khusus kerja sama Australia-Indonesia dalam konteks ini tidak hanya terletak pada skala dan cakupan inisiatif, tetapi juga pada pendekatan komprehensif yang berupaya mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender dalam sektor ekonomi. Hal ini menjadikan inisiatif Investing in Women sebagai studi kasus yang berharga untuk memahami dinamika dan potensi kerja sama bilateral dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menganalisis dasar kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia serta wujud implementasi kerja sama tersebut dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inisiatif Investing in Women (IW). Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitian **“Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”**.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi inisiatif Investing in Women (IW) periode Fase 1, Fase 2 dan sebagian Fase 3 (masih berlangsung) di Indonesia, yaitu sejak tahun 2016 hingga 2025. Periode tersebut dipilih dikarenakan merepresentasikan siklus implementasi program yang telah berjalan, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil setelah kurang lebih sembilan tahun berjalan Rentang waktu ini juga mencakup periode sebelum,

dan setelah pandemi COVID-19, sehingga memungkinkan analisis yang hensif tentang bagaimana program ini beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan. Fase 1 (April 2016 – Juni 2019) mewakili



tahap inisiasi dan konsolidasi program, sementara Fase 2 (Juli 2019 – Juni 2023) mencerminkan periode penguatan, transfer pengetahuan, dan perluasan jangkauan program di tengah tantangan global. Sebagian Fase 3 (Juli 2023 – Juni 2025) di mana fase ini menjadi momentum terhadap komitmen transisi menuju fase keberlanjutan jangka panjang.

Secara spesifik, penelitian ini melibatkan dua *stakeholder* utama, yakni: Pemerintah Australia, serta mitra implementasi lokal dalam hal ini Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Kedua *stakeholder* tersebut berperan sebagai aktor kunci dalam operasionalisasi kerja sama bilateral di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemerintah Australia, melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), bertindak sebagai donor dan perancang strategis program, sedangkan IBCWE menjadi eksekutor lapangan yang mengadaptasi dan menerjemahkan strategi program ke dalam konteks lokal Indonesia. Dinamika interaksi antara kedua aktor ini mencerminkan karakteristik khas dari implementasi kerja sama bilateral yang efektif, dimana terjadi sinergi antara sumber daya dan keahlian internasional dengan pemahaman dan jaringan lokal. Olehnya itu, keduanya terpilih menjadi batasan analisis pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan inisiatif Investing in Women (IW) dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.



1.3.3 Rumusan Masalah

Dengan membatasi masalah penelitian tersebut, berikut ini rumusan yang akan terbagi dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Apa yang mendasari kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?
2. Bagaimana wujud implementasi kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Untuk menganalisis wujud implementasi kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Salah satu sumbangsih dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya terkait kerja sama bilateral, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan di bidang kerja sama bilateral dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
3. Referensi program-program serupa yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi.



1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, penulis menggunakan dua konsep, yaitu kerja sama bilateral dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Berikut uraian dan relevansi konsep-konsep yang dimuat dalam penelitian ini:

1.4.1 Kerja sama Bilateral

Di tengah kompleksitas tantangan global dan penguatan institusi multilateral, kerja sama bilateral tetap mempertahankan relevansinya sebagai instrumen efektif untuk mengoperasionalkan komitmen internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kesetaraan gender. K.J. Holsti menyatakan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika dua atau lebih pihak dengan kepentingan atau tujuan yang berbeda saling bertemu dan berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang nantinya dapat diimplementasikan secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Menurut Avivi & Siagian (2020), kerja sama bilateral terjadi ketika dua negara sepakat untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan bagi keduanya. Secara umum, kerja sama bilateral muncul karena adanya kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai tujuan-tujuan tertentu, yang mendorong terwujudnya kerja sama yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Lude & Kresnawati, 2024).



Konsep kerja sama bilateral pada penelitian ini berfokus pada kerja sama lakukan antar negara dalam hal ini terjadi antara Australia dan Indonesia. uma bilateral antara Australia dan Indonesia memiliki sejarah panjang dan

mencakup berbagai bidang. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai secara resmi pada Desember 1949, ketika Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025). Sejak saat itu, hubungan bilateral kedua negara berkembang dan mengalami pasang surut. Australia juga merupakan salah satu mitra pembangunan bilateral terbesar bagi Indonesia, dengan program bantuan yang secara konsisten fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan institusi, dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif Investing in Women (IW) adalah salah satu manifestasi dari komitmen Australia terhadap pembangunan inklusif di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Indonesia merupakan mitra perdagangan yang penting bagi Australia. Pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat sebagai mitra dagang terbesar kesembilan Australia dengan nilai total perdagangan mencapai \$35,38 miliar. Selain itu, Indonesia juga menjadi pasar ekspor terbesar kesepuluh bagi Australia dengan kontribusi sebesar \$165,13 miliar. Indonesia adalah pasar terbesar Australia untuk ekspor sapi hidup dan gandum, yang menunjukkan kuatnya hubungan perdagangan antara kedua negara. Di samping itu, Indonesia juga menjadi salah satu tujuan utama wisatawan Australia, yang semakin mempererat hubungan bilateral (DFAT, 2025).

Relevansi penggunaan konsep kerja sama bilateral dalam penelitian

"Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam Pemberdayaan

ni Perempuan" dikarenakan konsep ini menyediakan kerangka yang sistematis untuk menganalisis langkah kedua negara menyelaraskan



kepentingan mereka dan berkolaborasi melalui inisiatif Investing in Women. Melalui lensa kerja sama bilateral, penelitian dapat mengeksplorasi dinamika pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi program yang melibatkan dua aktor negara yang berbeda. Kemudian, penggunaan konsep ini juga memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana kepentingan nasional Australia dan Indonesia terartikulasi dan ternegosiasi dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini penting untuk memahami kepentingan di balik inisiatif tersebut dan bagaimana kedua pihak mencapai keberhasilan program.

1.4.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Hampir di setiap masyarakat dan di setiap bidang kehidupan, perempuan memiliki posisi dan status yang tidak setara, sehingga menjadi penting untuk menguatkan pemberdayaan mereka dengan menghadirkan kesempatan yang sama. Sejak awal berdirinya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), isu pembangunan perempuan telah menarik perhatian para cendekiawan di seluruh dunia, dan konsep ini telah menjadi agenda politik di banyak negara (Mandal, 2013).

Pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat untuk mengubah negara berkembang menjadi negara maju. Menurut Kate Young (1993), pemberdayaan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengendalikan hidup mereka menyusun prioritas pribadi, membentuk kelompok pendukung, serta rakan tuntutan baik kepada negara agar mendapat dukungan maupun masyarakat agar mendorong terjadinya perubahan sosial. Sementara itu,



Hashemi (1993) memandang pemberdayaan sebagai suatu proses dan hasil yang memungkinkan individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan-khususnya perempuan-untuk memperoleh akses dan kendali yang lebih besar terhadap sumber daya, baik yang bersifat materiil maupun intelektual. Sejalan dengan itu, Vinod (2004) menambahkan bahwa pemberdayaan juga berarti melawan ideologi yang melanggengkan subordinasi dan diskriminasi, yang menjadi akar dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Sementara itu, ekonom Bina Agarwal mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang mendorong individu atau kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki kekuatan untuk menantang serta mengubah struktur kekuasaan yang menyebabkan mereka berada dalam posisi yang lebih rendah dalam ranah ekonomi, sosial, maupun politik. Pemberdayaan perempuan sendiri dipahami sebagai sebuah proses transformasi baik secara pribadi maupun sosial, yang saling berhubungan dan memperkuat aspek psikologis, politik, sosial, serta ekonomi. Melalui proses ini, perempuan baik secara individu maupun bersama-sama, mampu memperoleh kekuatan, pilihan yang bermakna, dan kendali atas kehidupan mereka (O'Neil et al., 2014, sebagaimana dikutip dalam Chompa, 2022). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan dari pemberdayaan perempuan: pertama, untuk menantang dan mengubah ideologi dan praktik subordinasi perempuan; kedua, untuk mengubah struktur, sistem dan institusi yang telah menjunjung tinggi dan memperkuat diskriminasi, seperti keluarga,

kelas, etnis, serta struktur dan institusi sosial, ekonomi dan politik termasuk sistem pendidikan, media, hukum, model pembangunan yang bersifat dari



atas ke bawah, dan sebagainya; dan ketiga untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya material dan pengetahuan.

Ranah ekonomi turut menjadi medan transformatif dalam proses pemberdayaan, terutama dalam menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai konsep dalam studi Hubungan Internasional berakar pada tradisi teoretis feminis yang mengkritisi relasi kekuasaan berbasis gender dalam politik global. Konsep ini memperoleh signifikansi analitis oleh Kabeer (2012) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses transformatif yang memungkinkan perempuan memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan strategis dalam konteks di mana kemampuan tersebut sebelumnya dinegasikan. Dalam konteks ekonomi, Golla, et al., (2011:4) memperluas definisi ini dengan mengkonseptualisasikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai "kapasitas perempuan untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan memperoleh manfaat dari proses pertumbuhan dengan cara yang mengakui nilai kontribusi mereka, menghormati martabat mereka, dan memungkinkan negosiasi distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil".

Pencapaian pendidikan dan partisipasi ekonomi merupakan konstituen utama dalam memastikan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan elemen penting dari pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara mana pun. Sebagai konsep multidimensional, pemberdayaan ekonomi



uan mencakup proses peningkatan akses, kesempatan, serta kapasitas
uan untuk terlibat secara aktif, setara, dan bermakna dalam aktivitas

ekonomi. Untuk dapat berkembang secara ekonomi, perempuan tidak hanya memerlukan keterampilan dan sumber daya yang memadai agar mampu bersaing di pasar, tetapi juga harus memiliki akses yang adil terhadap lembaga-lembaga ekonomi. Lebih dari itu, agar perempuan memiliki kekuatan (*power*) dan kendali (*agency*) dalam memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi, mereka perlu memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri serta mengelola sumber daya dan keuntungan yang dihasilkan (Golla, et al., 2011).

Secara praktis, kerangka konseptual ini memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap inisiatif Investing in Women (IW) dengan mempertimbangkan dimensi struktural, institusional, dan normatif dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan demikian, relevansi penggunaan konsep pemberdayaan ekonomi perempuan dalam penelitian ini sangat signifikan karena: (1) memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas program IW dalam konteks pemberdayaan perempuan di Indonesia; (2) dan memungkinkan identifikasi faktor-faktor struktural, institusional, dan normatif yang memengaruhi keberhasilan intervensi kerja sama bilateral.

Selanjutnya, dalam menjalankan inisiatif IW, Pemerintah Australia mengambil pendekatan berbasis target pembangunan global yang mencakup kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) (UNDP, 2025). Pendekatan ini mencerminkan strategi Australia dalam



tegrasikan agenda diplomasi dengan komitmen global terhadap tujuan SDGs 2030, sekaligus memastikan bahwa program kerja sama

bilateral dapat berkontribusi pada prioritas pembangunan nasional Indonesia (DFAT, 2025).

Dalam konteks SDG 5, Inisiatif IW secara khusus menargetkan Target 5.5 yang menekankan partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi (UNDP, 2025). Implementasi target ini diwujudkan melalui pembentukan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) sebagai platform untuk mendorong peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan perusahaan. Sementara itu, dalam kerangka SDG 8, inisiatif IW berkontribusi pada Target 8.5 tentang pencapaian ketenagakerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dengan upah yang setara (UNDP, 2025). Hal ini direalisasikan melalui promosi praktik-praktik inklusif gender di tempat kerja. Dengan demikian, penggunaan perspektif SDGs 5 dan 8 tidak hanya memperkaya kerangka konseptual penelitian, tetapi juga menyediakan parameter evaluasi yang objektif dan kontekstual untuk menganalisis peran kerja sama Australia-Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inisiatif Investing in Women (IW).



1.5 Operasionalisasi Variabel

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

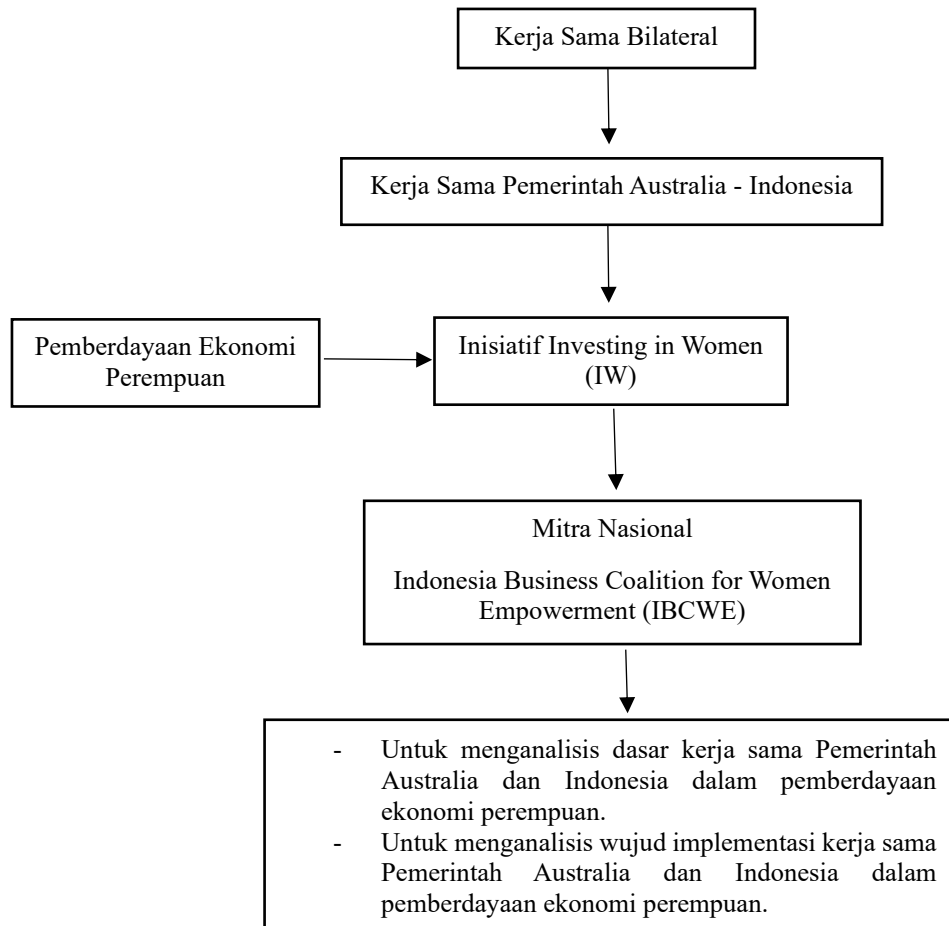
Variabel Dependen	Variabel Independen	Kategori	Indikator
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kerja Sama Pemerintah Australia dan Indonesia melalui inisiatif Investing in Women (IW)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan kelima (kesetaraan gender).	1. Kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong kesetaraan gender di tempat kerja; 2. Memajukan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor badan kelola; 3. Implementasi praktik-praktik inklusif gender seperti kebijakan cuti parental, fleksibilitas kerja, dan inisiatif melawan pelecehan seksual.
		Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan kedelapan (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).	1. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (<i>female labor force participation rate</i>) di Indonesia. 2. Penurunan kesenjangan upah gender (<i>gender wage gap</i>) dalam sektor-sektor yang menjadi target intervensi; 3. Meningkatkan investasi dalam bisnis yang secara proporsional menguntungkan perempuan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025



1.6 Model Analisis

Bagan 1 1 Model Analisis



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Creswell (2009), melalui bukunya menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial salah manusia (Creswell, 2009). Penelitian ini diharapkan menghasilkan



analisis penelitian yang bersifat deskriptif analitik dalam mengkaji kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inisiatif Investing in Women (IW) Australia.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* utama, yaitu Pemerintah Australia dan mitra implementasi lokal, yaitu Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). Data yang diperoleh dari wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dari para aktor yang terlibat.
- Data Sekunder: Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan artikel ilmiah, laporan, dan dokumen resmi pemerintahan, serta laporan berita dari sumber yang terpercaya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan kajian pustaka (*library research*). Teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para aktor kunci yang terlibat dalam



perencanaan dan pelaksanaan inisiatif Investing in Women (IW) dengan berpotensi yakni perwakilan Pemerintah Australia (Kedutaan Besar Australia, Jakarta atau Staff DFAT) yang menangani inisiatif IW serta manajemen

IBCWE. Selanjutnya, pengumpulan data yang berasal dari kajian pustaka (*library research*) akan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk artikel, laporan, dokumen resmi dari lembaga-lembaga terkait, artikel ilmiah, serta data statistik yang relevan dengan topik penelitian.

Tabel 2 Sumber Data Penelitian

Tabel Sumber Data Penelitian	
Jenis Data	Sumber
Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>)	Para aktor kunci yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan inisiatif Investing in Women (IW) dengan narasumber potensial yakni perwakilan Pemerintah Australia (Kedutaan Besar Australia, Jakarta atau Staff DFAT) yang menangani inisiatif IW yang diwakili oleh Mrs. Sophie MacKinnon selaku First Secretary DFAT Australia in Indonesia dan Ibu Siti Alifah Dina selaku Senior Program Manager DFAT Australia in Indonesia, serta manajemen IBCWE yang diwakili oleh Ibu Zelda Lupsita selaku (Act.) Deputy Executive Director for Program.
Data Sekunder diperoleh melalui kajian pustaka (<i>library research</i>)	Laman resmi pemerintah Australia: DFAT Official Portal https://www.dfat.gov.au Kedutaan Besar Australia di Indonesia https://indonesia.embassy.gov.au/ Laman resmi Pemerintah Indonesia: Kementerian Keuangan RI https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/ Kementerian Luar Negeri RI https://kemlu.go.id/ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI https://komnasperempuan.go.id/ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia https://www.setneg.go.id/ Komnas Perempuan https://komnasperempuan.go.id/ Laman & dokumen resmi perusahaan IBCWE https://ibcwe.id/ https://www.mbcgea.com/edge-certification/



Investing in Women (IW)

<https://investinginwomen.asia/indonesia/>
<https://investinginwomen.asia/resources>

Buku, artikel, jurnal dan berbagai database ilmiah:

Cambridge University Press, Chicago University Press, CORE, Elsevier, Google Scholar, JSTOR, Library Genesis, Oxford University Press, Princeton University Press, ProQuest, PubMed, ResearchGate, Routledge Taylor & Francis Group, Sage Journals, ScienceDirect, Sci-Hub, dan sebagainya menggunakan kata kunci yang relevan.

Laporan resmi Organisasi Internasional dan data statistik:

Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id/id>

GoodStats

<https://goodstats.id/>

International Labour Organization (ILO)

<https://www.ilo.org/>

Lowy Institute

<https://www.lowyinstitute.org/>

OECD

<https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>

OECD Gender Data

<https://www.oecd.org/gender/>

UNDP

<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

United Nations

<https://www.un.org/>

UN Global Compact

<https://unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles>

UN Women

[UN Women](https://asiapacific.unwomen.org/)

<https://asiapacific.unwomen.org/>

World Bank

<https://www.worldbank.org/>

World Bank Gender Data Portal

[World Bank Gender Data](#)

Berita media konvensional maupun portal daring:

Al-Jazeera, BBC News, CNN, CSIS, Kompas, Reuters, Tempo, The Diplomat, The Jakarta Post, dan sebagainya.



1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam menggunakan teknik analisis ini, permasalahan dijelaskan melalui fakta-fakta yang ada menggunakan konsep dan teori yang terdapat pada kerangka konseptual penelitian, yang kemudian saling dihubungkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Setelah itu, kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hubungan antar fakta tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kerangka sebuah penelitian ilmiah, tinjauan pustaka memegang peranan krusial sebagai fondasi intelektual yang menopang seluruh argumen dan analisis. Bagian ini tidak hanya bertujuan untuk menunjukkan pemahaman mendalam peneliti terhadap literatur yang relevan, namun juga untuk mengidentifikasi celah (*gap*) dalam studi-studi serta penelitian sebelumnya yang akan diisi oleh kontribusi penelitian ini.

Bab ini akan membahas 2 (dua) konsep yang digunakan dalam menganalisis kerja sama pemerintah Australia dan Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Konsep kerja sama bilateral digunakan untuk menjelaskan definisi, bentuk, asumsi teori yang relevan, serta bagaimana dinamika hubungan bilateral dapat memengaruhi implementasi program bersama. Sementara itu, konsep pemberdayaan ekonomi perempuan digunakan untuk menguraikan makna, tujuan, dan dimensi-dimensi pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi. Berikut merupakan penjelasan masing-masing konsep tersebut.

2.1 Kerja Sama Bilateral

Dalam disiplin hubungan internasional, interaksi antarnegara memberikan ruang bagi terbentuknya relasi yang bersifat multidimensional. Relasi tersebut umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan atau kebutuhan strategis masing-masing negara terhadap sumber daya, keamanan, maupun pengaruh. Secara umum, hubungan internasional merujuk pada segala bentuk interaksi yang



melintasi batas kedaulatan suatu negara dan melibatkan aktor-aktor yang beragam, baik negara (*state*) maupun non-negara (*non-state actors*). Interaksi ini dapat bersifat formal maupun informal, dan dapat berlangsung antara institusi, kelompok, maupun individu dari negara yang berbeda, selama interaksi tersebut menyeberangi batas teritorial negara yang bersangkutan (Mingst & Arreguín-Toft, 2016). Hubungan yang terjalin menjadi sebuah proses interaksi lintas negara kemudian melahirkan berbagai bentuk hasil, baik berupa kesepakatan seperti perjanjian formal maupun bentuk kerja sama lainnya yang mencerminkan kepentingan bersama para pihak yang terlibat.

Dalam hal teoretis, kerja sama internasional sebagai proses penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari eksternalitas atau untuk mencapai keuntungan bersama (Keohane, 1984). Keohane (1984, hal. 51-52, 63) secara eksplisit membedakan kerja sama dari harmoni. Harmoni mengacu pada situasi ketika kebijakan masing-masing aktor dijalankan untuk kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan pihak lain, namun tetap secara otomatis mendukung tercapainya tujuan pihak lain. Sebaliknya, kerja sama membutuhkan usaha aktif dari para aktor untuk menyelaraskan kebijakan mereka agar sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pihak lain. Kerja sama biasanya muncul dari adanya perbedaan pendapat atau potensi konflik; tanpa adanya perbedaan ini, yang terjadi hanyalah harmoni, bukan kerja sama. Penyesuaian kebijakan ini dapat terjadi melalui negosiasi atau penyesuaian adaptif.



J. Holsti (1998) turut membagikan pandangannya dengan menyatakan bahwa kerja sama internasional dapat dipahami melalui beberapa dimensi penting.

Pertama, kerja sama mencerminkan pertemuan antara dua atau lebih aktor internasional yang memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang sejalan, dimana masing-masing pihak dapat memperoleh manfaat secara bersama-sama. Kedua, pandangan bahwa kerja sama juga mengandung unsur ekspektasi, yakni harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan mendukung tercapainya kepentingan serta nilai-nilai nasionalnya. Ketiga, kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan atau penanganan isu-isu tertentu oleh dua negara atau lebih yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan atau bahkan sebagai respons terhadap konflik kepentingan yang ada. Keempat, kerja sama melibatkan adanya aturan (baik yang bersifat formal maupun informal) yang mengatur perjanjian di masa mendatang guna menjamin implementasi dari kesepakatan tersebut. Kemudian kelima, kerja sama mencakup proses interaksi antarnegara dalam rangka merealisasikan isi kesepakatan yang telah disepakati bersama (Holsti, 1988 sebagaimana dikutip dalam Haryanto, 2015, hal. 16). Perspektif ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak selalu lahir dari kesamaan kepentingan, melainkan dari kemampuan untuk menciptakan konvergensi kepentingan melalui proses negosiasi dan kompromi.

Lebih lanjut, teori-teori dalam Hubungan Internasional menghadirkan perspektif beragam mengenai kerja sama. Robert Axelrod, berasumsi bahwa kerja sama dapat muncul dan bertahan bahkan di antara aktor-aktor yang egois dalam kondisi tertentu, terutama melalui strategi timbal balik (*reciprocity*) dalam interaksi

ulang (*iterated Prisoner's Dilemma/iterated games*). Maksudnya adalah uasi ini, setiap pihak memiliki dua pilihan: bekerja sama (*cooperate*) atau



berkhianat (*defect*). Hal apa pun yang dilakukan, berkhianat selalu memberikan hasil yang lebih tinggi. Namun, jika keduanya berkhianat, keduanya akan mendapatkan hasil yang lebih buruk daripada jika keduanya bekerja sama. Situasi ini dikatakan "berulang" karena para pihak mungkin akan bertemu lagi di masa depan, yang memungkinkan pilihan yang dibuat hari ini memengaruhi pilihan di masa depan. Axelrod menekankan pentingnya kepercayaan dan reputasi dalam membangun kerja sama jangka panjang (Axelrod, 1984). Sebaliknya, perspektif realisme struktural (neorealis), seperti yang diutarakan oleh Kenneth Waltz dan John Mearsheimer, cenderung skeptis terhadap kerja sama yang substansial dan berkelanjutan di arena internasional. Bagi kaum realis, negara adalah aktor utama yang rasional dan mengutamakan kepentingan nasional serta keamanan diri (*self-help*) dalam sistem anarki. Kerja sama, jika terjadi, seringkali bersifat sementara dan didasarkan pada perhitungan kekuatan relatif, bukan pada niat baik atau nilai bersama. Akibatnya kerja sama seringkali terhambat oleh kekhawatiran akan distribusi keuntungan yang tidak seimbang (Waltz, 1979). Mearsheimer, berpendapat bahwa negara-negara besar cenderung memaksimalkan kekuatan relatif mereka, sehingga kerja sama menjadi sulit dan rentan terhadap kecurangan (*cheating*) atau keuntungan relatif (*relative gains*) (Mearsheimer, 2001).

Meski demikian, pendekatan liberal institusionalisme menawarkan pandangan yang lebih optimis terhadap kerja sama. Para sarjana seperti Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa institusi internasional memainkan



ning dalam memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi *transaction* menyediakan informasi, dan menciptakan ekspektasi timbal balik. Institusi

dapat membantu negara-negara mengatasi dilema kerja sama dengan menyediakan kerangka aturan, norma, dan prosedur (Keohane & Nye, 2011).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa interaksi dan kerja sama antarnegara tidaklah berlangsung tanpa alasan, melainkan dilandasi oleh berbagai motif strategis yang mencerminkan kepentingan masing-masing negara. Menurut Peter Toma dan Robert Gorman (1991, hal. 385-386 sebagaimana dikutip dalam Hakim, 2018) terdapat beberapa motivasi utama yang mendorong negara-negara untuk menjalin kerja sama, di antaranya:

1. Kerja sama dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan nasional; negara memanfaatkan relasi internasional sebagai sarana untuk mengamankan dan memperluas pengaruh serta kepentingannya di kancah global;
2. Terdapat motivasi untuk menjaga stabilitas dan menciptakan perdamaian, di mana kerja sama diyakini mampu meredam potensi konflik serta mencegah pecahnya peperangan di antara negara-negara yang memiliki ketegangan politik;
3. Dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi menjadi pendorong penting, karena melalui kerja sama internasional, negara berharap dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dan mempercepat pembangunan nasional;
4. Kerja sama juga dimaksudkan sebagai respons terhadap berbagai eksternalitas negatif yang timbul dari aktivitas global, seperti degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, maupun ancaman



transnasional seperti terorisme, yang semuanya memerlukan penanganan lintas negara secara kolektif.

Kerja sama internasional dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama bilateral yang melibatkan dua negara, kerja sama multilateral yang mencakup lebih dari dua negara, kerja sama regional yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang berada dalam suatu kawasan tertentu, serta kerja sama melalui organisasi internasional. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada kerja sama bilateral, untuk melihat interaksi dua negara, dalam hal ini Australia dan Indonesia menyelaraskan kepentingan mereka dan berkolaborasi melalui inisiatif Investing in Women (IW).

Kerja sama bilateral merupakan hubungan langsung antara dua negara untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing. Konsep ini menekankan adanya komunikasi, dialog, dan mekanisme negosiasi langsung yang lebih mudah dikompromikan tanpa perlu konsensus yang melibatkan banyak pihak, yang berbeda dengan pola kerja sama multilateral maupun regional. Kerja sama bilateral menjadi penting karena menawarkan fleksibilitas, kecepatan pengambilan keputusan, serta sensitivitas terhadap isu-isu spesifik yang tidak selalu dapat diakomodasi secara multilateral. Oleh karena itu, bilateralisme sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mendesak atau sensitif, seperti perbatasan, perdagangan, keamanan, bahkan masalah lingkungan hidup. Motivasi di balik kerja sama bilateral dapat bervariasi,

kepentingan bersama dalam isu spesifik, kebutuhan komplementer, atau satu negara memiliki sumber daya yang dibutuhkan negara lain),



kedekatan geografis, ikatan historis, atau kesamaan nilai-nilai politik dan ekonomi (Perwita & Yani, 2005).

Hubungan bilateral adalah batu fondasi bagi hubungan internasional yang lebih luas, dimana masing-masing negara membangun jaringan kemitraan untuk kepentingan nasional, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan bilateral dapat berupa hubungan khusus (*special relations*), hubungan normal (*normal relations*), hingga hubungan yang lebih bersifat periferifal sesuai kepentingan dan intensitas interaksi antar negara (Rana, 2007).

Instrumen *foreign aid* (bantuan luar negeri) sering menjadi sarana implementatif dari kesepakatan kerja sama yang ada. Mengutip laman resmi OECD, Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA) merujuk pada bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah negara donor kepada negara berkembang dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara penerima. Bantuan ini biasanya menjadi bagian dari agenda kerja sama pembangunan bilateral maupun multilateral dan mencerminkan komitmen jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (OECD, 2025). Inisiatif Investing in Women (IW) merupakan program yang didanai dan diimplementasikan oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), yang secara eksplisit bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik. Keterlibatan DFAT



embaga pemerintah donor, serta fokus program pada pembangunan dan raan, menempatkan IW secara jelas dalam kerangka ODA. Oleh karena

itu, kerja sama bilateral antara Australia dan Indonesia dalam konteks IW tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik dan ekonomi, tetapi juga komitmen Australia sebagai negara donor dalam agenda pembangunan global, khususnya pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan, sekaligus sebagai instrumen kebijakan luar negeri Australia.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi perempuan (*Women's Economic Empowerment*) merupakan konsep multidimensi yang berkembang dalam studi pembangunan dan hubungan internasional. Konsep pemberdayaan ekonomi perempuan berakar dari gagasan awal mengenai *empowerment* yang mulai berkembang pada dekade 1970-an. Pemberdayaan merujuk pada upaya peningkatan kapasitas individu maupun kelompok untuk berpartisipasi, memengaruhi, dan menuntut akuntabilitas institusi yang berdampak pada kehidupan mereka. Pada dekade 1970-an, wacana pembangunan internasional mulai memberi perhatian pada perempuan melalui pendekatan Women in Development (WID) yang muncul sejak Konferensi Dunia tentang Perempuan di Kota Meksiko tahun 1975¹. Namun, pendekatan WID pada saat itu masih cenderung melihat perempuan sebagai penerima manfaat pembangunan, bukan sebagai subjek yang aktif.

Pada dekade 1980-an, konsep pemberdayaan ekonomi perempuan mulai dirumuskan secara lebih jelas oleh banyak pakar feminis, peneliti dan pembuat



an Bangsa-Bangsa, Konferensi Dunia pertama tentang Status Perempuan yang menandai upaya global sistematis untuk mendorong kesetaraan gender melalui Dekade PBB untuk (1976–1985).

kebijakan dari Selatan Global. Pemberdayaan perempuan diperkenalkan sebagai sebuah strategi transformasi sosial. Mereka menekankan bahwa pemberdayaan perempuan membutuhkan upaya menyeluruh untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi yang memiskinkan, menempatkan perempuan sebagai agen utama dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan yang berpusat pada manusia, serta menuntut pengorganisasian perempuan untuk mendorong perubahan politik yang fundamental (DAWN, 1988).

Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat penting bagi transisi negara berkembang menuju negara maju. Dimensi utama pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan harga diri dan kepercayaan diri perempuan, kendali atas kehidupan pribadi maupun sosial, serta kemampuan memengaruhi perubahan sosial demi terwujudnya tatanan yang lebih adil di tingkat nasional maupun global (Singh & Gupta, 2013).

Batliwala (1994), melihat pemberdayaan sebagai proses politik yang melibatkan upaya menantang relasi kekuasaan yang ada serta memperoleh kendali atas sumber-sumber kekuasaan. Tujuan utama pemberdayaan perempuan, menurutnya, adalah menentang ideologi patriarki, mentransformasi institusi yang melanggengkan diskriminasi gender dan ketidaksetaraan sosial, serta memastikan akses perempuan (khususnya kelompok miskin) terhadap sumber daya material dan informasi. Ia menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang mencakup ranah domestik maupun publik, serta mendorong aksi kolektif

erakan massal. Batliwala juga menegaskan bahwa perubahan tidak akan utan jika hanya menyasar individu, sebab struktur kekuasaan tradisional



berpotensi mengisolasi mereka. Oleh karena itu, strategi kolektif diperlukan untuk mewujudkan transformasi sosial yang setara (Batliwala, 1994 sebagaimana dikutip dalam Tandon, 2016).

Naila Kabeer mengeksplorasi pengukuran pemberdayaan perempuan dengan menekankan bahwa konsep ini adalah tentang individu yang selama ini tidak dapat membuat pilihan strategis dalam hidup mereka, lantas mendapatkan kemampuan tersebut. Kabeer berasumsi bahwa pemberdayaan melibatkan tiga dimensi yang saling berkaitan: sumber daya (*resources*) yakni hal yang mencakup akses terhadap materi dan sosial; agensi (*agency*) yang merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas pilihan tersebut, bahkan melalui negosiasi atau perlawanan; serta pencapaian (*achievements*) berupa hasil kesejahteraan. Baginya, pemberdayaan ekonomi adalah bagian integral dari proses ketiga dimensi ini, di mana perempuan memiliki akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi untuk membuat pilihan yang lebih baik bagi hidupnya (Kabeer, 1999).

Selaras dengan pernyataan tersebut, Amartya Sen (1999) mengaitkan pemberdayaan dengan kebebasan instrumental. Sen berargumen bahwa pembangunan harus berfokus pada perluasan kebebasan substantif individu. Pemberdayaan ekonomi perempuan, dalam pandangannya, adalah manifestasi dari peningkatan kebebasan ini, di mana perempuan memiliki kapabilitas dan peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Perempuan tidak dipandang hanya sebagai penerima pasif bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi

sebagai agen aktif perubahan (*active agents of change*) dan “promotor transformasi sosial” yang dapat mengubah kehidupan perempuan dan laki-



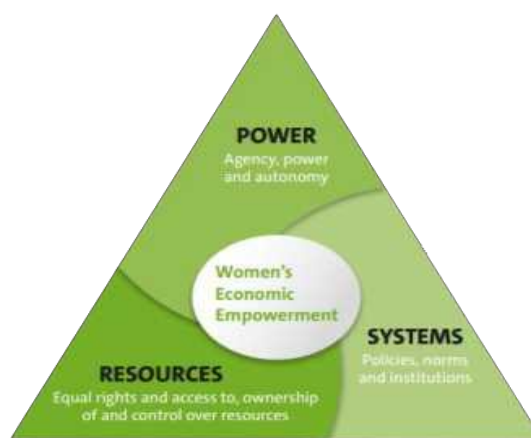
laki (Sen, 1999, hal. 189). Kemudian, kemampuan perempuan untuk bekerja di luar rumah, mendapatkan pendapatan mandiri, dididik dan memiliki properti secara signifikan meningkatkan status sosial perempuan di rumah tangga dan masyarakat. Perubahan yang terjadi termasuk di antaranya, penurunan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan partisipasi politik, dan perubahan norma sosial. Pemberdayaan ekonomi perempuan meningkatkan kekuatan pengambilan keputusan (*decisional power*) perempuan dan perhatian terhadap kepentingan mereka. Kontribusi perempuan terhadap kehidupan keluarga menjadi lebih terlihat, dan mereka memiliki suara yang lebih besar karena kurang bergantung pada orang lain (Sen, 1999, hal. 191-195). Argumen ini sekali lagi menunjukkan pergeseran fundamental dalam keseimbangan kekuasaan, yang pada akhirnya menjadikan pemberdayaan ekonomi bukan hanya output ekonomi, tetapi juga transformasi dalam hubungan kekuasaan antara gender.

UN Women, sebagai institusi yang kredibel turut mendefinisikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai suatu proses transformasi yang secara kolektif bertujuan menghasilkan tatanan ekonomi yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Proses ini berorientasi pada terwujudnya tatanan di mana setiap perempuan mampu menikmati hak-hak ekonomi dan sosialnya, serta memiliki agensi dan kapasitas untuk menghadapi ketidaksetaraan dan mendorong terciptanya kesetaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perempuan perlu memperoleh hak, akses, kepemilikan, dan kendali yang setara atas sumber daya, aset, pendapatan,

serta kehidupan mereka sendiri (UN Women, 2024). Dari berbagai definisi dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah sebuah



proses kompleks yang melibatkan peningkatan kapasitas perempuan untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya ekonomi (modal, tanah, pasar), serta mentransformasikan hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga mereka memiliki agensi dan otonomi untuk membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.



Gambar 1 Elemen-elemen Kunci Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Sumber: oleh UN Women, 2024

Salah satu pendekatan penting lainnya dalam menganalisis konsep pemberdayaan ekonomi perempuan adalah Ekonomi Feminis (*Feminist Economics*). Ekonomi Feminis menolak asumsi bahwa individu dalam ekonomi adalah aktor netral gender atau *homo economicus* yang hanya mengejar rasionalitas dan efisiensi. Sebaliknya, ia menekankan bahwa relasi sosial dan gender membentuk pengalaman ekonomi seseorang. Ekonomi arus utama gagal hitungkan aspek kerja perawatan (*care work*), kerja domestik, dan kekuasaan dalam rumah tangga yang sangat berpengaruh terhadap



kondisi ekonomi perempuan (Ferber & Nelson, 1993). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan dipandang sebagai upaya korektif terhadap bias struktural dalam ekonomi.

Pengakuan global terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan mencapai titik penting pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995 melalui The Beijing Declaration and Platform for Action². Sejak itu, istilah *women economic empowerment* atau pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi terminologi dalam kebijakan pembangunan internasional dan diadopsi oleh berbagai lembaga global seperti PBB dan Bank Dunia. Komitmen ini kemudian diperkuat melalui Millennium Development Goals (MDGs) 2000–2015, khususnya Tujuan 3 tentang kesetaraan gender, serta dilanjutkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030, terutama Tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan Tujuan 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi perempuan diposisikan sebagai instrumen utama pembangunan berkelanjutan sekaligus bagian integral dari agenda hak asasi manusia global.

Sektor swasta menjadi aktor strategis yang perlu memperoleh perhatian khusus karena perannya yang signifikan dalam struktur produksi, ketenagakerjaan, dan distribusi kesempatan ekonomi. Berbeda dengan intervensi negara yang cenderung bersifat regulatif dan berbasis kebijakan publik, sektor swasta memiliki



² The Beijing Declaration and Platform for Action merupakan hasil Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan yang diselenggarakan PBB di Beijing, China pada tahun 1995. Dokumen ini merupakan kerangka kerja global paling komprehensif dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan menetapkan 12 area kritis mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi politik dan ekonomi.

kapasitas langsung dalam menciptakan lapangan kerja, menetapkan norma dan budaya kerja, serta mempengaruhi pola distribusi sumber daya ekonomi di tingkat mikro maupun makro. Di Indonesia, di mana struktur pasar tenaga kerja masih ditandai oleh dualisme antara sektor formal dan informal, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong transisi perempuan dari pekerjaan rentan dan berupah rendah menuju pekerjaan formal yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, sektor swasta juga berperan penting dalam membuka akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, serta peluang pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan mobilitas karir. Oleh karena itu, memahami keterlibatan dan komitmen sektor swasta dalam pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi elemen krusial untuk menilai efektivitas upaya pembangunan inklusif dan kesetaraan gender di Indonesia.

Konsep pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki keterkaitan langsung dengan inisiatif Investing in Women (IW). Program ini melihat bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam kerangka ekonomi formal serta dukungan kebijakan yang responsif gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga memperlihatkan bagaimana negara donor seperti Australia memanfaatkan kerangka kerja global, yakni SDGs untuk membangun kemitraan yang memperkuat posisi perempuan di pasar tenaga kerja dan sektor kewirausahaan di Indonesia.

2.3 Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian yang tengah dilakukan oleh penulis. Pembahasan mengenai kerja sama

pemerintah Australia dan Indonesia merupakan hal yang umum dan telah menarik perhatian para peneliti internasional untuk menghasilkan penelitian mengenai topik ini. Namun, penelitian dan analisis dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan masih sedikit bahkan belum ada secara spesifik mengangkat kasus inisiatif Investing in Women (IW). Pemanfaatan temuan dari studi-studi sebelumnya memastikan penelitian ini dibangun di atas landasan yang kuat dan relevan, sekaligus memberikan kontribusi baru pada bidang yang masih jarang dieksplorasi. Olehnya itu, dalam tinjauan literatur ini, penulis memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan penelitian ini, namun tetap terdapat perbedaan baik dari segi konsep, teori, ataupun studi empiris dan akan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini:

Penelitian pertama berjudul **“Kerja sama Indonesia – Australia melalui Program MAMPU dalam Hal Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”** oleh Fayzah Anggana Abhirama, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura merupakan publikasi Journal of International Relations pada tahun 2022. Jurnal ini menyoroti kemitraan strategi antara Pemerintah Australia dan Indonesia melalui Program MAMPU (2013-2020), yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui pemberian akses kepada program sosial, pelatihan, pengorganisasian kelompok, dan advokasi kebijakan. Melalui dukungan dana, teknis, dan jejaring mitra, program MAMPU berfokus pada lima area tematik utama, yaitu: perlindungan sosial, kondisi kerja, perlindungan buruh migran

an, kesehatan dan gizi, serta kepemimpinan perempuan dalam memerangi
1 berbasis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif



dalam meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka, mendorong reformasi hukum yang berpihak pada perempuan, mengurangi kemiskinan berbasis gender, serta memperkuat jaringan sosial perempuan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan, dimana program ini hadir sebagai langkah atas komitmen terhadap SDGs dan dari segi konsep juga menggunakan kerja sama bilateral. Namun, penelitian ini tidak memiliki area tematik program yang spesifik untuk dibahas, kemudian tidak secara spesifik mengangkat studi kasus dan aktor khusus, serta tidak menyertakan analisis implementasi jangka panjang program.

Penelitian berikutnya merupakan skripsi oleh Dieska Noor Prasanti berjudul **“Peran UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Melalui *We Empower Asia*”** pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur, wawancara bersama para *stakeholder* yang terlibat, serta observasi program. Penelitian ini membahas peran UN Women sebagai inisiator, fasilitator, dan determinator dalam mengimplementasikan program WeEmpowerAsia selama tiga tahun di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women memainkan peran utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara aktif dengan mengadopsi kebijakan berbasis prinsip Women’s Empowerment Principles (WEPs), penerapan bisnis responsif gender, pelatihan menggunakan modul *We Rise Toolkit* dan pelaporan pencapaian kesetaraan gender di perusahaan.



Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup tinggi dengan penelitian yang dilakukan dikarenakan penelitian ini berfokus pada program

pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya pada sektor swasta, dan dari segi konsep juga menggunakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mampu menjelaskan analisa implementasi jangka panjang dari program WeEmpowerAsia karena durasi program yang berjalan singkat.

Penelitian berikutnya berjudul **“Gender equality in the workplace: A comparative review of USA and African Practices”** (Adeniyi et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik-praktik kesetaraan gender di tempat kerja dengan membandingkan dua konteks yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dan sejumlah negara di Afrika. Penelitian ini menganalisa bagaimana kerangka hukum, kebijakan, program perusahaan, dan norma sosial-budaya memengaruhi pencapaian kesetaraan gender. Dengan menggunakan pendekatan *comparative review*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, kemajuan kesetaraan gender didukung oleh hukum yang kuat, seperti Equal Pay Act dan Title VII Civil Rights Act. Selain itu, perusahaan besar seperti Salesforce, IBM, dan Procter & Gamble juga menerapkan *diversity & inclusion programs*. Meski demikian, masih terdapat tantangan pada perbedaan upah yang terus berlangsung, masa cuti keluarga berbayar (*paid family leave*) yang terbatas, serta kurangnya perempuan di posisi kepemimpinan. Di Afrika, kesetaraan gender lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan gerakan dari masyarakat. Contohnya, Rwanda menerapkan kebijakan kuota 30% untuk perempuan di parlemen, Afrika Selatan



Employment Equity Act, serta Kenya memiliki Women Enterprise Fund untuk membantu wirausaha perempuan. Walau demikian, penerapan aturan yang

tidak konsisten, penolakan budaya, serta ketimpangan akses pendidikan dan layanan sosial tetap menjadi hambatan utama.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan membutuhkan kombinasi antara regulasi, program perusahaan, dan dukungan komunitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konteks sosial-budaya sangat memengaruhi efektivitas kebijakan kesetaraan gender. Perbedaan penelitian terlihat dimana penelitian ini lebih bersifat deskriptif-komparatif lintas kawasan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada analisis implementasi program dalam konteks kerja sama bilateral.

Untuk memberikan uraian secara jelas, penulis menyajikan klasifikasi penelitian terdahulu dalam bentuk tabel guna memvisualisasikan persamaan dan perbedaan, sekaligus memudahkan pembaca memahami informasi yang disampaikan.

Tabel 3 Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul Literatur (Penulis, Tahun)	Tujuan Penelitian	Teori atau Subjek Utama	Hasil Penelitian	Gap-spotting atau Perbedaan Penelitian
1.	Kerja sama Indonesia – Australia melalui Program MAMPU dalam Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan perempuan bhirama et al, 2022)	Untuk menganalisis apakah Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) telah berjalan sesuai dengan teori feminis liberal dan	Pemberdayaan perempuan Teori Feminis Liberal Konsep kerja sama bilateral	Program MAMPU (2013-2020), yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan miskin, telah sejalan dengan teori feminis liberal karena dapat meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka,	Penelitian ini tidak memiliki area tematik program yang spesifik untuk dibahas, kemudian tidak secara spesifik mengangkat studi kasus dan aktor khusus, serta tidak menyertakan analisis dampak implementasi



		konsep kerja sama bilateral.		mendorong reformasi hukum yang berpihak pada perempuan, mengurangi kemiskinan berbasis gender, serta memperkuat jaringan sosial perempuan. Terwujudnya kerja sama antara Indonesia dengan Australia dalam mencapai tujuan dari program MAMPU dinilai telah sesuai dengan konsep kerja sama bilateral.	jangka panjang program
2.	Peran UN Women dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di Indonesia Melalui <i>We Empower Asia</i> (Prasanti, 2024)	Memahami peran UN Women dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui <i>WeEmpowerAsia</i> .	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Konsep Organisasi Internasional Pemberdayaan Perempuan	UN Women memainkan peran utama dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara aktif dengan mengadopsi kebijakan berbasis prinsip Women's Empowerment Principles (WEPs), penerapan bisnis responsif gender, pelatihan menggunakan modul <i>We Rise Toolkit</i> dan pelaporan pencapaian kesetaraan gender di perusahaan.	Penelitian ini tidak menggunakan konsep kerja sama bilateral, melainkan konsep organisasi internasional, dan tidak mampu menjelaskan analisa implementasi jangka panjang dari program <i>WeEmpowerAsia</i> karena durasi program yang berjalan singkat.



3.	Gender equality in the workplace: A comparative review of USA and African Practices (Adeniyi et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik-praktik kesetaraan gender di tempat kerja dengan membandingkan dua konteks yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dan sejumlah negara di Afrika	Kesetaraan gender di tempat kerja	Dengan menggunakan pendekatan <i>comparative review</i> , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dan sejumlah negara di Afrika, kemajuan pemberdayaan ekonomi perempuan membutuhkan kombinasi antara hukum yang kuat, program perusahaan, dan dukungan komunitas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konteks sosial-budaya sangat memengaruhi efektivitas kebijakan kesetaraan gender.	Penelitian ini lebih bersifat deskriptif-komparatif lintas kawasan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada analisis implementasi program dalam konteks kerja sama bilateral.
4.	Gender Mainstreaming in Indonesia's Bilateral Development Cooperation (Azis & Azarine, 2023)	Menganalisis bagaimana arus utama gender (<i>gender mainstreaming</i>) diintegrasikan dalam kerangka kerja sama pembangunan bilateral Indonesia dengan negara mitra.	Pengarusutamaan gender Kerja sama pembangunan internasional	Studi kasus yang ditampilkan adalah Proyek Triangular Cooperation (TriCo) Afghanistan–Indonesia–Jerman (April 2019–Juni 2020), yang bertujuan memperluas kebebasan ekonomi perempuan serta mendukung SDGs 5 (Kesetaraan	Walau terdapat kesamaan dengan menjadikan isu pemberdayaan perempuan sebagai inti analisis, penelitian ini tidak membahas aspek bagaimana program-program bilateral berpengaruh pada akses perempuan terhadap pekerjaan,



				Gender) dan 17 (Kemitraan Global). Indonesia dinilai cukup berhasil dan bahkan dapat menjadi model bagi negara lain dalam inisiatif pembangunan internasional berbasis kesetaraan gender, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan.	modal, aset, dan kepemimpinan di Indonesia.
5.	Empowering Women: Economic Participation and Leadership Development (Arivumani, 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi ekonomi dan peran kepemimpinan perempuan.	Pemberdayaan perempuan Pembangunan berkelanjutan Partisipasi ekonomi	Hasil penelitian ini mengungkap bahwa akses terhadap pendidikan, pelatihan kepemimpinan, mentorship atau program pengembangan diri, serta dukungan institusional berupa kebijakan yang mendukung berpengaruh positif secara signifikan pada partisipasi yang lebih tinggi dalam peran kepemimpinan. Meski demikian, adanya hambatan struktural, budaya, dan diskriminasi gender masih menjadi tantangan utama.	Penelitian ini terbatas pada analisis faktor internal dan institusional yang memengaruhi partisipasi ekonomi dan peran kepemimpinan perempuan secara umum. Sebagai celah, penelitian yang akan dilakukan akan melihat dinamika kerja sama antarnegara yang bersifat bilateral, bagaimana interaksi program kerja sama, dan kebijakan luar negeri kedua negara dapat membentuk strategi pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.



6.	Women's Economic Empowerment and Its Implications for Sustainable Growth in Indonesia: A Systematic Review of Scholarly Works (Rahmadania et al., 2025)	Untuk menelaah secara sistematis literatur akademik mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.	Pemberdayaan ekonomi perempuan Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia	Pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs kelima dan kedelapan). Namun, masih terdapat hambatan berupa ketimpangan akses pendidikan, diskriminasi pasar tenaga kerja, serta norma budaya yang membatasi peran perempuan. Penelitian juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan digital bagi UMKM perempuan agar dapat beradaptasi dengan ekonomi digital.	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>systematic literature review</i> , sehingga hanya menyintesis karya-karya sebelumnya tanpa menganalisis implementasi program nyata atau studi kasus yang spesifik. Tidak menggunakan teori atau konsep sebagai alat analisis.
7.	Women's Empowerment in India-South Korea Relations: A Shared Journey (Aitha et al., 2023)	Memahami upaya India dan Korea Selatan dalam pemberdayaan perempuan melalui kebijakan pemerintah, pendidikan, STEM, <i>soft power</i> budaya,	Pemberdayaan Perempuan Interaksi lintas budaya	Penelitian tentang hubungan India-Korea Selatan menunjukkan adanya dedikasi bersama dan kemajuan pemberdayaan perempuan melalui	Penelitian ini turut membahas upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks kerja sama antar negara, walau secara spesifik tidak berfokus menjelaskan seperti apa



		dan kerja sama bilateral.		kebijakan pemerintah, inisiatif dan program pemerintah, penguatan kolaborasi di bidang teknologi dan STEM, dan pengaruh <i>soft power</i> budaya pada perubahan persepsi sosial.	dinamika kerja sama yang terjadi. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek multidimensi yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang spesifik pada pemberdayaan ekonomi perempuan.
--	--	---------------------------	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia lebih berfokus pada upaya yang menargetkan kelompok atau komunitas miskin, sehingga terdapat celah strategis dan operasional terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia yang juga memerlukan perhatian dalam penyediaan instrumen praktis bagi sektor swasta dan integrasi lintas aktor. Inisiatif IW yang diinisiasi Australia hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya mendukung usaha perempuan, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja di perusahaan besar dan memperkuat ekosistem investasi inklusif di Indonesia. Penelitian ini hendak menjembatani *gap* tersebut dengan menelaah bagaimana kerja sama bilateral dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

